



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAERUDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.IP.

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



Elektronik oleh:

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.IP.



Elektronik oleh:

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1			
1.	Meningkatnya Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,25
Sasaran			
1.1	Meningkatnya Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,35
1.2	Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,15
Tujuan 2			
2.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80
Sasaran			
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Nilai Kepuasan Masyarakat	80
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,44

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 5.060.650.000,-	APBD
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 39.699.130.000,-	APBD
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 109.378.242.000,-	APBD
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 4.215.255.000,-	APBD
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik	Rp. 15.804.720.000,-	APBD
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 17.300.800.000,-	APBD

Semarang, 31 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH



Utamadukungani secara elektronik oieh

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.IP.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



Utamadukungani secara elektronik oieh

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprovjtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si.

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAERUDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19710501 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sekretariat

NO (1)	PROGRAM DAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1
1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1

		Daerah	
		2) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100
1.8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	36

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran

Rp. 17.300.800.000,-

Keterangan

APBD

Semarang,

2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

SEKRETARIS

Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19710501 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si.

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAERUDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19710501 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sekretariat

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	100
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1
1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1

		Daerah	
		2) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100
1.8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	36

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran

Rp. 17.300.800.000,-

Keterangan

APBD

Semarang,

2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

SEKRETARIS

Drs. MUHAMMAD AGUNG HIKMATI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19710501 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAERUDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN
NASIONAL

AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH
Pembina
NIP.19650131 199309 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

NO (1)	PROGRAM DAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,40
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme	85 %
		2) Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90 %
2.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2,9
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1) Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	85 %
		2) Jumlah laporan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	1 Laporan
		3) Persentase penanganan konflik sosial	100

Program

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Anggaran

Rp. 5.060.650.000,-

Keterangan

APBD

Rp. 15.804.720.000,-

APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL



AGUNG Satrio PRAKOSA, SH, MH
Pembina

NIP.19650131 199309 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAERUDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN
NASIONAL

AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH
Pembina

NIP.19650131 199309 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

NO (1)	PROGRAM DAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,40
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1) Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme	85 %
		2) Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90 %
2.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2,9
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1) Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	85 %
		2) Jumlah laporan Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	1 Laporan
		3) Persentase penanganan konflik sosial	100

Program

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Anggaran
Rp. 5.060.650.000,-

Keterangan
APBD

Rp. 15.804.720.000,-

APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



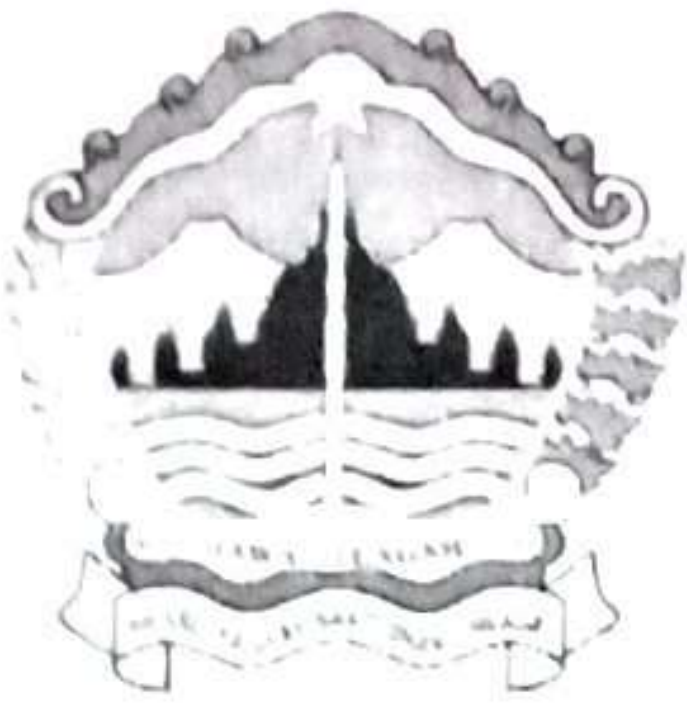
HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL



AGUNG Satrio Prakosa, SH, MH
Pembina
NIP.19650131 199309 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Bangsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAERUDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
KETAHANAN BANGSA

PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Pembina
NIP. 19820331 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Bidang Ketahanan Bangsa

NO (1)	PROGRAM DAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,11
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 %
		2) Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi	91,50%
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,39
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1) Persentase tindakan pencegahan dampak Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %
		2) Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	91,50 %

Program

1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Anggaran

Rp. 109.378.242.000,-
Rp. 4.215.255.000,-

Keterangan

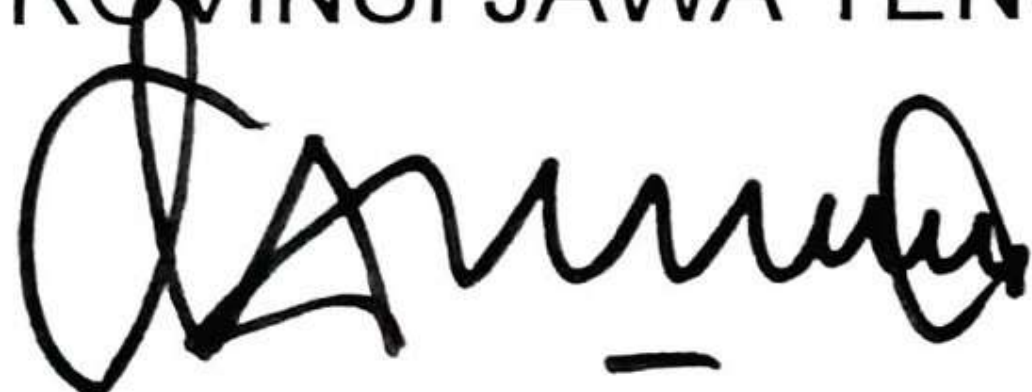
APBD
APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA



PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.
Pembina
NIP. 19820331 200012 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Bangsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAERUDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
KETAHANAN BANGSA

PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19820331 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Bidang Ketahanan Bangsa

NO (1)	PROGRAM DAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,11
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 %
		2) Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi	91,50%
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,39
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1) Persentase tindakan pencegahan dampak Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %
		2) Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	91,50 %

Program

1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Anggaran

Rp. 109.378.242.000,-

Keterangan

APBD

Rp. 4.215.255.000,-

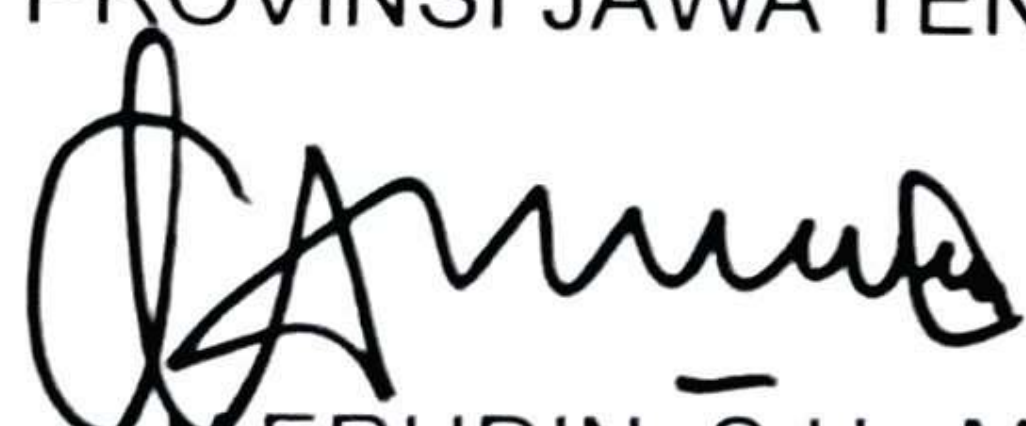
APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



HAERUDIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA



PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19820331 200012 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAERUDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI

SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19670726 199003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Bidang Politik Dalam Negeri

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,3
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%)	90,5 %
		2) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik.	90,5 %

NO (1)	PROGRAM DAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
		3) Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik	1 laporan
		4) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	90,5 %

Program

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Anggaran

Rp. 39.699.130.000,-

Keterangan

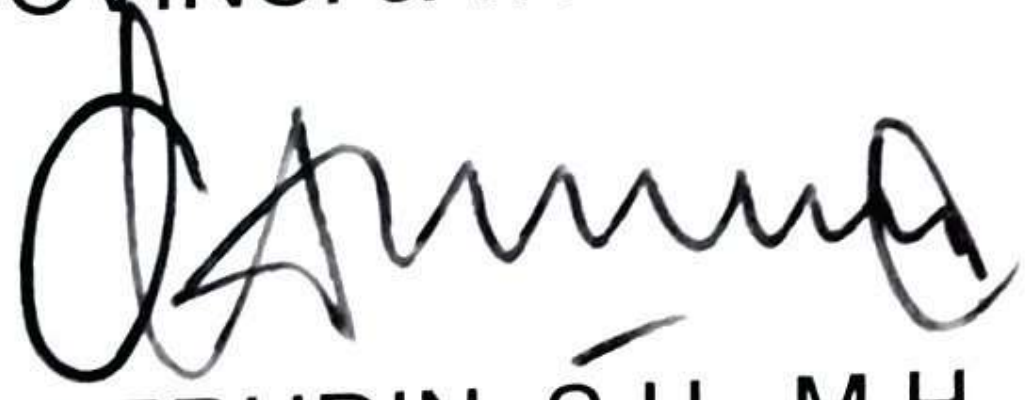
APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH


HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI


SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19670726 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAERUDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI

SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19670726 199003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Bidang Politik Dalam Negeri

NO (1)	PROGRAM DAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3,3
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%)	90,5 %
		2) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik.	90,5 %

NO (1)	PROGRAM DAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
		3) Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik	1 laporan
		4) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	90,5 %

Program

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Anggaran

Rp. 39.699.130.000,-

Keterangan

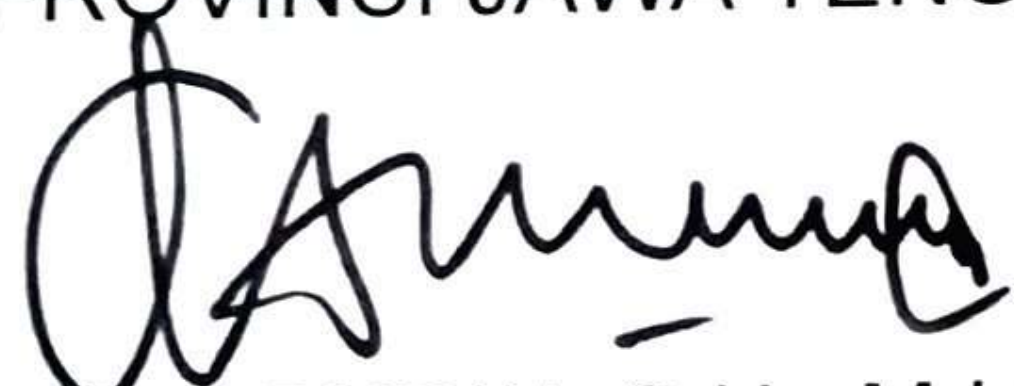
APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19700729 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI



SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19670726 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDI NUGROHO, S.STP.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
KEWASPADAAN NASIONAL


AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Pembina

NIP.19650131 199309 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR IDEOLOGI
DAN WAWASAN KEBANGSAAN


WIDI NUGROHO, S.STP.

Penata Tingkat I

NIP. 19811013 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1) Indikator Kinerja Kegiatan Persentase masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan generasi muda lintas etnis (orang)	100
		- Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (orang)	4.537
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Prov dan Kab/Kota (laporan)	1
		- Jumlah laporan Pembinaan Etnisitas dengan negara (laporan)	1

		2) Indikator Kinerja Kegiatan Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme	85
1.3	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ideologi yang tersusun (dokumen)	1
1.4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (orang)	400
1.5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah laporan pelaksanaan deradikalisasi terhadap eks napiter dan masyarakat rentan (laporan)	1
1.6	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Laporan Monev Bidang Bidang Ideologi dan Pembauran Kebangsaan (laporan)	1

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Anggaran

Rp. 5.060.650.000,-

Keterangan

APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
KEWASPADAAN


AGUNG Satrio Prakosa, SH, MH
Pembina
NIP.19650131 199309 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN


WIDI Nugroho, S.STP.
Penata Tingkat I
NIP. 19811013 200012 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDI NUGROHO, S.STP.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
KEWASPADAAN NASIONAL


AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Pembina

NIP.19650131 199309 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR IDEOLOGI
DAN WAWASAN KEBANGSAAN


WIDI NUGROHO, S.STP.

Penata Tingkat I

NIP. 19811013 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1) Indikator Kinerja Kegiatan Persentase masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan generasi muda lintas etnis (orang)	100
		- Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (orang)	4.537
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Prov dan Kab/Kota (laporan)	1
		- Jumlah laporan Pembinaan Etnisitas dengan negara (laporan)	1

		2) Indikator Kinerja Kegiatan Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme	85
1.3	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ideologi yang tersusun (dokumen)	1
1.4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (orang)	400
1.5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah laporan pelaksanaan deradikalisasi terhadap eks napiter dan masyarakat rentan (laporan)	1
1.6	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Laporan Monev Bidang Bidang Ideologi dan Pembauran Kebangsaan (laporan)	1

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Anggaran

Rp. 5.060.650.000,-

Keterangan

APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
KEWASPADAAN



AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Pembina

NIP.19650131 199309 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN



WIDI NUGROHO, S.STP.

Penata Tingkat I

NIP. 19811013 200012 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUSPITO ARIS GUNAWAN, S.H.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
KEWASPADAAN

AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Pembina

NIP. 19650131 199309 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR
KEWASPADAAN NASIONAL

PUSPITO ARIS GUNAWAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760901 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	85
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Masyarakat yang mengikuti fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (orang)	4.150
		- Jumlah Masyarakat yang mengikuti peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini (orang)	380
		2) Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan	1
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional yang tersusun (dokumen)	1
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	- Jumlah laporan kunjungan VIP/VVIP	1

	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Sub Kegiatan Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(laporan)	
		- Jumlah laporan pantauan kunjungan orang asing (laporan)	1
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 9.310.290.000 Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Dukungan Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pilpres/Kepala Daerah	1
		- Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan (laporan)	1
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	- Jumlah Laporan Fasilitasi Forkopimda (laporan)	1
		3) Persentase penanganan konflik sosial (%)	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	- Jumlah kajian perumusan Penanganan Konflik Sosial (laporan)	60

	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah laporan deteksi dini (laporan)	1
		- Jumlah laporan penanganan konflik sosial (laporan)	3

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Anggaran
Rp. 15.804.720.000,-

Keterangan
APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
KEWASPADAAN



AGUNG Satrio PRAKOSA, SH, MH

Pembina

NIP.19650131 199309 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN NASIONAL



PUSPITO ARIS GUNAWAN, S.H.

_Penata Tingkat I

NIP. 19760901 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUSPITO ARIS GUNAWAN, S.H.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
KEWASPADAAN

AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Pembina

NIP.19650131 199309 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR
KEWASPADAAN NASIONAL

PUSPITO ARIS GUNAWAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760901 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1) Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	85
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Masyarakat yang mengikuti fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (orang)	4.150
		- Jumlah Masyarakat yang mengikuti peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini (orang)	380
		2) Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan	1
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional yang tersusun (dokumen)	1
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	- Jumlah laporan kunjungan VIP/VVIP	1

	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Sub Kegiatan Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(laporan)	
		- Jumlah laporan pantauan kunjungan orang asing (laporan)	1
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 9.310.290.000 Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Dukungan Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pilpres/Kepala Daerah	1
		- Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan (laporan)	1
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	- Jumlah Laporan Fasilitas Forkopimda (laporan)	1
		3) Persentase penanganan konflik sosial (%)	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	- Jumlah kajian perumusan Penanganan Konflik Sosial (laporan)	60

	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah laporan deteksi dini (laporan)	1
		- Jumlah laporan penanganan konflik sosial (laporan)	3

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Anggaran
Rp. 15.804.720.000,-

Keterangan
APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
KEWASPADAAN

AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Pembina

NIP.19650131 199309 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN NASIONAL

PUSPITO ARIS GUNAWAN, S.H.

_Penata Tingkat I

NIP. 19760901 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HARUN ARROSYID, S.STP., M.A.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi
Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Bangsa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
KETAHANAN BANGSA

PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19820331 200012 1 001

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

MUHAMMAD HARUN ARROSYID, S.STP., M.A.

Penata Tingkat I

NIP.19900509 201010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan

NO (1)	KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1) Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi	91,50
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah masyarakat yang mengikuti mediasi sengketa ormas dan pengawasan ormas dan ormas asing di daerah (orang)	250
		- Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan (orang)	4.250
		2) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yang tersusun (dokumen)	1
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Desk dan Verifikasi Ormas	7
		- Jumlah Laporan pemberdayaan dan pengawasan ormas	6
1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas	35

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Anggaran

Rp. 109.378.242.000,-

Keterangan

APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KETAHANAN BANGSA



PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19820331 200012 1 001

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR ORGANISASI
KEMASYARAKATAN



MUHAMMAD HARUN ARROSYID, S.STP, M.A

Penata Tingkat I

NIP.19900509 201010 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HARUN ARROSYID, S.STP., M.A.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi
Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Bangsa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
KETAHANAN BANGSA

PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19820331 200012 1 001

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

MUHAMMAD HARUN ARROSYID, S.STP., M.A

Penata Tingkat I

NIP.19900509 201010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan

NO (1)	KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1) Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi	91,50
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah masyarakat yang mengikuti mediasi sengketa ormas dan pengawasan ormas dan ormas asing di daerah (orang)	250
		- Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan (orang)	4.250
		2) Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yang tersusun (dokumen)	1
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Desk dan Verifikasi Ormas	7
		- Jumlah Laporan pemberdayaan dan pengawasan ormas	6
1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas	35

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Anggaran

Rp. 109.378.242.000,-

Keterangan

APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KETAHANAN BANGSA



PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19820331 200012 1 001

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR ORGANISASI
KEMASYARAKATAN



MUHAMMAD HARUN ARROSYID, S.STP,M.A

Penata Tingkat I

NIP.19900509 201010 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRIGIT NURCIPTO C, S.H.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Bangsa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
KETAHANAN BANGSA

PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19820331 200012 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA

FRIGIT NURCIPTO C, S.H.

Penata Tingkat I

NIP.19680101 199603 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1) Prosentase tindakan pencegahan dampak Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/ Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa (laporan)	1
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	- Jumlah laporan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (laporan)	1
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (laporan)	1

	Daerah		
1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (laporan)	1
		2) Prosentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	91,5 %
1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (orang)	560
		- Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika (orang)	500
		- Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (orang)	4.150

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Anggaran

Rp. 4.215.255.000,-

Keterangan

APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA



PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

_Pembina

NIP. 19820331 200012 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA



FRIGIT NURCIPTO C, S.H.

Penata Tingkat I

NIP.19680101 199603 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRIGIT NURCIPTO C, S.H.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Bangsa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
KETAHANAN BANGSA

PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19820331 200012 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA

FRIGIT NURCIPTO C, S.H.

Penata Tingkat I

NIP.19680101 199603 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1) Prosentase tindakan pencegahan dampak Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/ Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa (laporan)	1
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	- Jumlah laporan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (laporan)	1
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (laporan)	1

	Daerah		
1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (laporan)	1
		2) Prosentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	91,5 %
1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (orang)	560
		- Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika (orang)	500
		- Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (orang)	4.150

Kegiatan

- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Anggaran

Rp. 4.215.255.000,-

Keterangan

APBD

Semarang,

2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA



PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP., M.M.
Pembina
NIP. 19820331 200012 1 001

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA



FRIGIT NURCIPTO C, S.H.
Penata Tingkat I
NIP.19680101 199603 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD WINARTO, S.H.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI

SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP.19670726 199003 1 005

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR PEMILU,
PENDIDIKAN
DAN BUDAYA POLITIK

RAHMAD WINARTO, S.H.

Penata

NIP.19820609 201101 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik

NO (1)	KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%)	90,5
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah kajian strategik pengembangan politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	1
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi sistem dan implementasi politik (orang)	385
		- Jumlah perguruan tinggi yang terlibat dalam kemitraan pengembangan demokrasi (kab/kota)	240
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan,	- Jumlah laporan situasi dan kondisi politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	

	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
		2) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%)	90,5
		- Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan dan demokrasi dan etika budaya politik (orang)	4.790
		- Jumlah masyarakat media/pers yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik	150

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Anggaran

Rp. 4.579.697.000,-

Keterangan

APBD

Semarang,

2023

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR PEMILU, PENDIDIKAN
DAN BUDAYA POLITIK

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI

SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19670726 199003 1 005



RAHMAD WINARTO, S.H.
Penata
NIP.19820609 201101 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD WINARTO, S.H.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI


SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP.19670726 199003 1 005

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR PEMILU,
PENDIDIKAN
DAN BUDAYA POLITIK


RAHMAD WINARTO, S.H.

Penata

NIP.19820609 201101 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik

NO (1)	KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1) Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%)	90,5
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah kajian strategik pengembangan politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	1
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi sistem dan implementasi politik (orang)	385
		- Jumlah perguruan tinggi yang terlibat dalam kemitraan pengembangan demokrasi (kab/kota)	240
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan,	- Jumlah laporan situasi dan kondisi politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	

	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
		2) Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%)	90,5
		- Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan dan demokrasi dan etika budaya politik (orang)	4.790
		- Jumlah masyarakat media/pers yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik	150

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Anggaran

Rp. 4.579.697.000,-

Keterangan

APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI

SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19670726 199003 1 005

Semarang, 2023

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR PEMILU, PENDIDIKAN
DAN BUDAYA POLITIK


RAHMAD WINARTO, S.H.
Penata
NIP.19820609 201101 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 160 Semarang Telp. (024) 8414 205 - 8454 990, Fax. (024) 8313 122, Email : program.kesbangprov.jtg@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIMIK SUKAMTO, S.E.

Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sistem Implementasi Kelembagaan Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

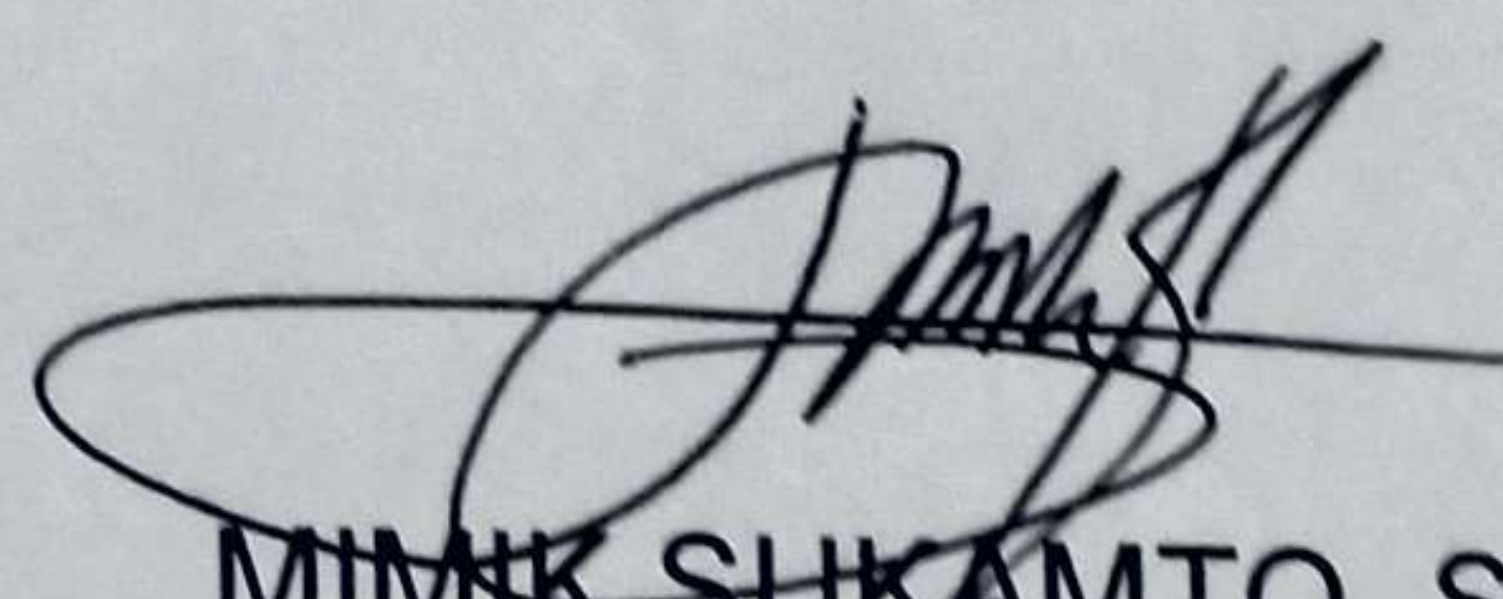
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI

Pihak Pertama,
ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SISTEM
IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN POLITIK

SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19670726 199003 1 005


MIMIK SUKAMTO, S.E.
Penata Tingkat I
NIP.19660502 198602 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Sistem Implementasi Kelembagaan Politik

NO (1)	KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%)	90,5
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan pemahaman keterbukaan informasi publik (orang) - Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan penatausahaan bantuan keuangan partai politik (orang) - Jumlah kader parpol yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik (orang) 	<p>160</p> <p>320</p> <p>100</p>
		2) Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan)	1
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri yang tersusun (dokumen)	1

1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah laporan Perkembangan Demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	1
1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah Laporan Pendataan Parpol (laporan) - Jumlah laporan pelaksanaan bantuan partai politik (laporan)	1 1

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Anggaran
Rp. 35.119.433.000,-

Keterangan
APBD

Semarang, 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

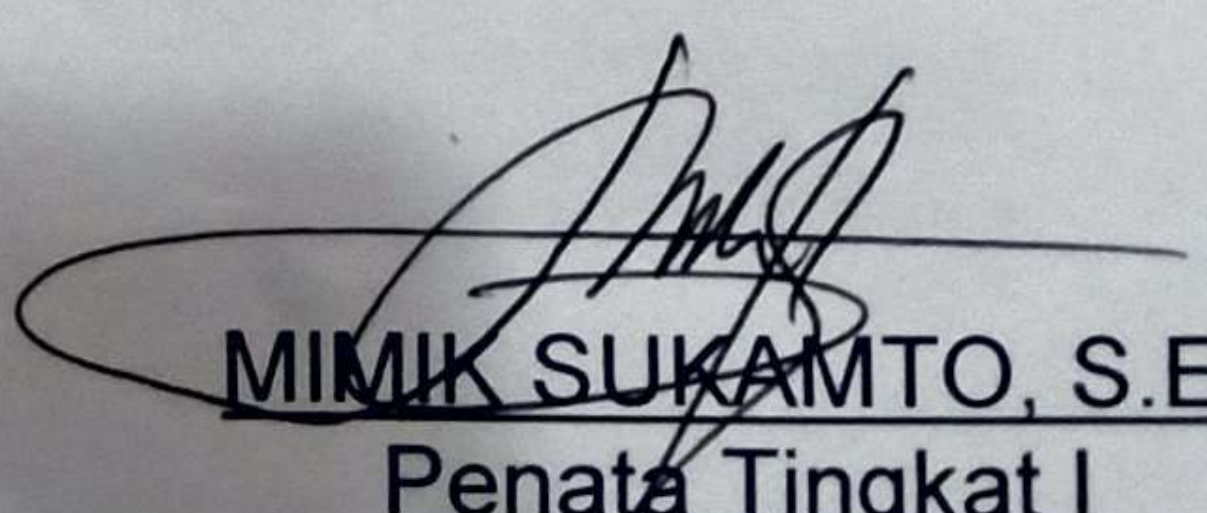

SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP.19670726 199003 1 005

Pihak Pertama,

ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SISTEM IMPLEMENTASI
KELEMBAGAAN POLITIK


MIMIK SUKANTO, S.E.

Penata Tingkat I

NIP.19660502 198602 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Koordinator Sistem Implementasi Kelembagaan Politik

NO (1)	KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1) Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%)	90,5
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan pemahaman keterbukaan informasi publik (orang) - Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan penatausahaan bantuan keuangan partai politik (orang) - Jumlah kader parpol yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik (orang) 	<p>160</p> <p>320</p> <p>100</p>
		2) Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan)	1
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri yang tersusun (dokumen)	1

1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah laporan Perkembangan Demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	1
1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah Laporan Pendataan Parpol (laporan)	1
		- Jumlah laporan pelaksanaan bantuan partai politik (laporan)	1

Kegiatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Anggaran
Rp. 35.119.433.000,-

Keterangan
APBD

Semarang, 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


SULISTYO YULI UTOMO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19670726 199003 1 005

Pihak Pertama,
ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SISTEM IMPLEMENTASI
KELEMBAGAAN POLITIK

MIMIK SUKAMTO, S.E.
Penata Tingkat I
NIP.19660502 198602 1 003